RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

KABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan secara baik dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan sesuai periode RPJMD Kabupaten Lamongan yakni dari tahun 2021 hingga 2026, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan EvaluasiPembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, SertaTata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rencana Strategis menyajikan rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air setiap tahunnya yang disertai pagu indikatif yang secara eksplisit dijelaskan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan. Dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air juga disajikan target capaian indikator daerah berdasarkan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Lamongan pada akhir periode RPJMD.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Lamongan, September 2021

KEPALA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. EC. M. JUPRI, MM
Pembina Tk.1
Nip. 19650920 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 4

DAFTAR GAMBAR 5

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-7

1.4 Sistematika penulisan I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH II-1

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

2.1.1 Kedudukan dan Tuga II-1

2.1.2 Fungsi II-1

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-16

2.2.1 Sumber Daya Manusia II-16

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana II-17

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-20

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah II-29

2.4.1 Tantangan II-29

2.4.2 Peluang II-30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Lamongan III-3

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi III-6

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD III-11

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis III15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Klasifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian II-16
TABEL II.2 Klasifikasi ASN Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan II-16
TABEL II.3 Klasifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan II-16
TABEL II.4 Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-17
TABEL II.5 Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-19
TABEL II.6 Jenis Dan Jumlah Sarana Gedung Dan BangunanDinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-20
TABEL II.7 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-21
TABEL II.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-23
TABEL II.9 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan II-23
TABEL III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah III-2
TABEL III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Lamongan III-5
TABEL III.5 Telaah KLHS pada RENSTRA Dinas PU. Sumber Daya Air III-11
TABEL III.6 Telaah KLHS Pada RENSTRA Dinas PU. Sumber Daya Air III-14
TABEL IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah IV-5
TABEL IV.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasaran, Definisi Operasional, Formulasi, Sumber Data, dan Penetapan target IV-6
TABEL V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan V-2
TABEL VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan VI-2
TABEL VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan I-2
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air II-15
Gambar IV.1 Cascading Misi III Pada RPJMD Tahun 2021-2026 ..... IV-2
Gambar IV.2 Cascading RENSTRA Dinas PU. Sumber Daya Air Tahun 2021-2026 ..... IV-3
Gambar IV.3 Keselarasan Sasaran Program dan Kegiatan Pada RENSTRA Dinas PU. Sumber Daya Air Tahun 2021-2026 ..... IV-4

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis, terarah dan berkesinambungan apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta tetap memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun Strategi Pembangunan Daerah dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Untuk dapat menyelenggarakan kepemerintahan yang baik maka diperlukan adanya perencanaan yang matang, termasuk didalamnya perencanaan terhadap sasaran dan target-target pembangunan harus jelas dan terukur. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana strategi (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dilingkungan organisasi Perangkat Daerah. Dalam Menyusun Rencana strategi (Renstra) Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Keterkaitan dokumen Renstra PD dengan RPJMD, Renstra KL dan Renja PD dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Renstra PD yang berdimensi 5 tahun merupakan rencana kegiatan PD dalam rangka mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah. Secara detil, Visi dan Misi Kepala Daerah dijabarkan dalam RPJMD dengan Target Tahunan terukur
b. Renstra Kementerian/Lembaga secara umum memiliki Strategi dan Arah Kebijakan yang selaras dengan Renstra PD. Sehingga dalam lingkup teknis operasional, Dokumen Renstra PD harus berkolerasi kuat dengan Renstra K/L.
c. Pencapaian target Renstra PD yang berdimensi 5 tahun, untuk selanjutnya di distribusikan ke dalam target – target tahunan yang diuraikan secara terperinci dalam Rencana Kerja PD.

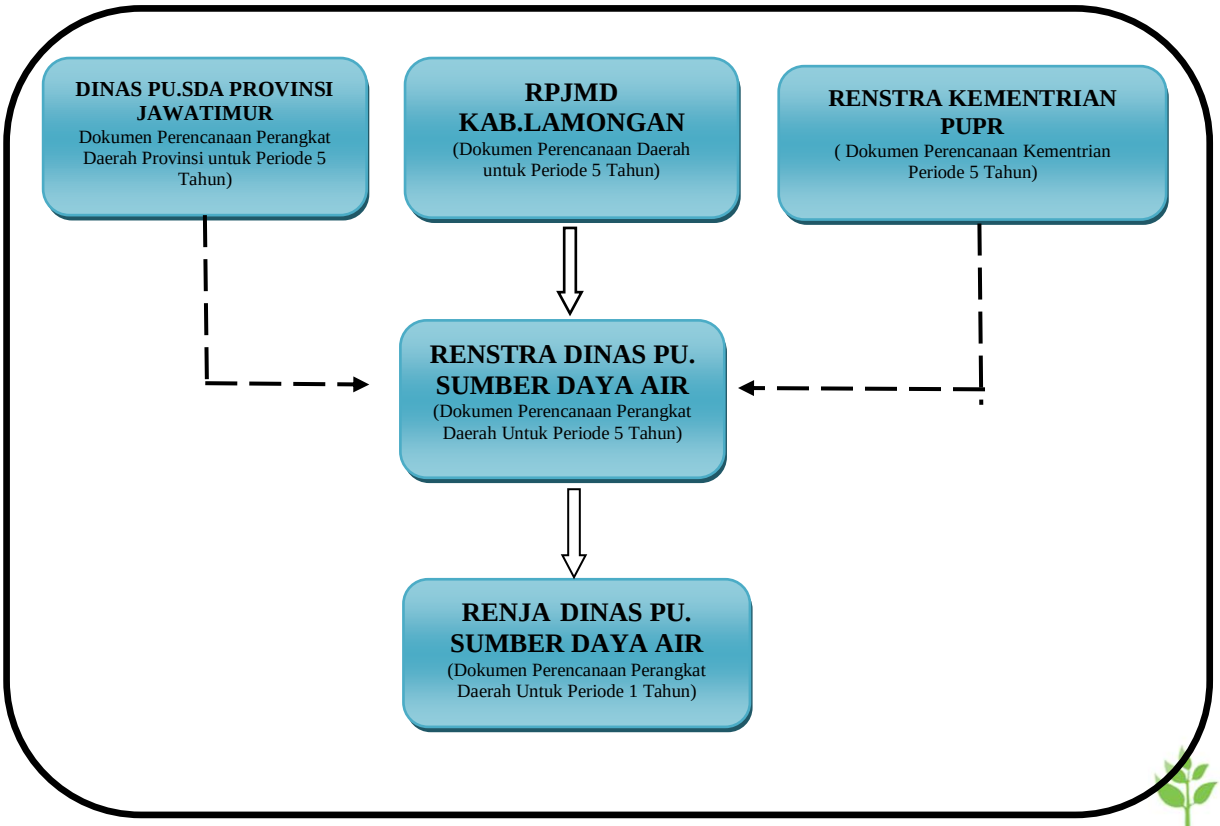

Gambar 1.1 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan itu sendiri serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (output) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021 -2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 -2026. Selanjutnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

I.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021 -2026 adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan

Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

17. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

18. Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan

19. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi

20. Peraturan Menteri PUPR Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Komisi Irigasi

21. Peraturan Menteri PUPR Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Irigasi

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3); dan
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
38. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

I.3 Maksud Dan Tujuan

Maksut Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk menyiapkan instrument perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan pada periode Tahun 2016 -2021 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja *(performance indicator)* yang terukur untuk lima tahun kedepan. Rumusan tujuan tersebut dapat

diuraikan Sebagai berikut :

a. Menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan sebagai dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja ;
b. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sektor Sumber Daya Air dengan mengacu dokumen RPJMD Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021 dengan menetapkan sasaran maupun target - target pembangunan dengan indikator yang terukur.

I.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021– 2026 disusun dengan sistematika adalah sebagai berikut :

- BAB I. PENDAHULUAN

  1.1. Latar Belakang

  Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaiatan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

  1.2. Landasan Hukum

  Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah , struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan data laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme) tentang struktur organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih oprasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangakt Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah propinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

- BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berisi tentang isu – isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah (PD) dimasa lima tahun mendatang

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan visi, misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (PD) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD Provinsi / Kabupaten

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Kajian Lingkungan Hidup Strategi pada RPJMD.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor – faktor dari pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang mempengaruhi permasalahan dan pelayanan Perangkat Daerah (PD) .

- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

  4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (PD)

- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

  Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebiajakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

  Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

  Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- BAB VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008**, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2008**, tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR Kabupaten Lamongan. Kemudian disesuaikan berdasarkan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2020** tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan.

2.1.1 Kedudukan dan Tugas

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air rmempunyai fungsi terdiri dari :

a. Penyusunan perencanaan bidang Sumber Daya Air ;
b. Pelaksanaan pelayanan umum bidang Sumber Daya Air;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air;
d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air ;
e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Air;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sumber Daya Air;

g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sumber Daya Air;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya ;

Selanjutnya, berdasarkan landasan hukum yang sama, Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

Tugas : merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air.

Fungsi :
a. Perencanaan bidang sumber daya air;
b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber daya air;
c. Perumusan kebijakan teknis di sumber daya air;
d. Pemantauan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
e. Penyelenggaraan kebijakan bidang sumber daya air;
f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
g. Pembinaan administrasi dinas di bidang sumber daya air;
h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat;

Tugas : mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi : a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;

g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;

i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;

j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

Tugas : a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;

b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
g. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
h. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
i. melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;

j. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkup Dinas;

k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas : a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;

c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;

d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana,pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;

e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;

g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tuga secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;

Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis penatagunaan dan pemanfaatan jaringan irigasi permukaan rehabilitasi embung dan Penampung Air Lainnya dan menginventarisasi bangunan-bangunan liar dalam asset sumber daya air serta kerjasama dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Fungsi : a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan pembuatan rencana teknis pembangunan serta perbaikan embung Desa, jaringan irigasi Desa dan sumber air;
b. Penyeliaan bahan penyusunan rencana program penyuluhan dan pemberian perizinan dibidang sumber daya air;
c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan aset sumber daya air dan dampak pembangunan;
d. Perencanaan, pemberian dan pelaksanaan perizinan terhadap penetapan, perubahan atau pembongkaran bangunan diatas prasarana sumber daya air;
e. Penyelenggaraan inventarisasi embung Desa, jaringan irigasi Desa dan sumber daya air yang dikelola oleh masyarakat/pengguna air;

f. Penyelenggaraan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan di bidang sumber daya air;
g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

1. Seksi Irigasi Pedesaan;

Tugas : a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan perbaikan embung Desa, jaringan irigasi Desa dan Sumber air;
b. Menyiapkan bahan rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan embung Desa, jaringan irigasi dan sumber air;
c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pembangunan dan perbaikan embung Desa, jaringan irigasi Desa dan sumber air;
d. Melaksanakan pendataan dan inventarisasi pelaksanaan pemeliharaan embung Desa, jaringan irigasi desa dan sumber air;
e. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Perijinan;

Tugas : a. Melaksanakan pengkajian terhadap permohonan dan
rekomendasi izin pemanfaatan asset-asset sumber daya air;

b. Menginventarisasi bangunan-bangunan liar dalam asset sumber daya air;
c. Melaksanakan Sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penertiban bangunan liar dan alih fungsi lahan;
d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan perizinan;
e. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas : a. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap para pengguna serta pemanfaat perkumpulan petani pemakai air (P3A/GP3A/IP3A);
b. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A);
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan sumber daya air;
d. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan;
e. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Penatagunaan Sumber Daya Air sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan,

Tugas : melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan kelengkapannya serta pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Fungsi :

a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan pembuatan rencana teknis operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase, bangunan pelengkapnya serta pengelolaan peralatan dan bahan banjiran;
b. Penyelenggaraan survey penelitian dan pengukuran berkaitan dengan rencana program pengembangan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
c. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
d. Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
e. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan hasil operasi dan pemeliharaan;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
g. Penyeliaan bahan dan peralatan serta Koordinasi dalam rangka penanganan dan pengendalian bencana alam akibat daya rusak air; dan
h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai degan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Operasi;

Tugas :

a. Menyiapkan inventarisasi luas areal irigasi, jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya, sumber mata air, sumber air tanah dan sumber air lainnya;

b. Menyiapkan data, monitoring dan penyusunan rencana serta evaluasi di bidang operasi, hidrologi dan hidrometri;
c. Merencanakan dan melaksanakan penyediaan air baku irigasi;
d. Menyiapkan bahan untuk menyusun, penetapan tata tanam, pembagian air irigasi serta pedoman dan tatalaksananya;
e. Menyiapkan bahan untuk menetapkan prioritas pembagian air dan melakukan pemantauan, evaluasi terhadap operasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta pelaksanaan pengguna air irigasi dan tata tanamnya;
f. menyusun bahan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan operasi, pengaturan air, pengendalian banjir dan kekeringan serta upaya pengendaliannya;
g. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemeliharaan;

Tugas : a. Menginventarisasi kerusakan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya;

b. Menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya;

c. Menyiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan teknis dan rehabilitasi akibat bencana alam;
d. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta penanggulangan akibat bencana alam;
e. Menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya serta penanggulangan akibat bencana alam;
f. Melaksanakan kegiatan penertiban terhadap sempadan air, bangunan yang melintasi kebersihan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapnya;
g. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Sarana dan Prasarana.

Tujuan : a. Menginventarisasi kerusakan alat berat dan pompa pengendali banjir;

b. Menyusun rencana kebutuhan bahan banjiran dan sarana pengendali banjir;
c. Mendistribusikan kebutuhan bahan banjiran dan pengoperasian unit pengendali banjir;
d. Melaksanakan Pemeliharaan alat berat dan pompa pengendali banjir;

e. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi

Tugas : melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air.

Fungsi: a. Penyeliaan bahan penyusunan program dan rencana teknis pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, sungai, waduk, rawa dan bangunan pelengkapnya;

b. Penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi sumberdaya air;

c. Penyelenggaraan survei dan pengukuran berkaitan dengan rencana program pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

d. Penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi sumberdaya air;

e. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

f. Penyelenggaraan evaluasi dan laporan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air;

g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Sungai;

Tugas : a. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran

pembangunan dan rehabilitasi sungai;

b. Melaksanakan program pembangunan sungai;
c. Melaksanakan program rehabilitasi sungai;
d. Menyusun inventarisasi bangunan di badan-badan sungai;
e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sungai;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi;

Tugas : a. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran
pembangunan dan rehabilitasi irigasi di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

b. Melaksanakan kegiatan pembangunan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
c. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d. Melaksanakan Koordinasi dalam rangka penyediaan air irigasi tahunan;
e. Menyusun inventarisasi bangunan dan jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi;
g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Waduk dan Rawa.

Fungsi : a. Menyusun program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran pembangunan dan rehabilitasi waduk dan rawa;

b. Melaksanakan penelitian pengembangan potensi waduk dan rawa;

c. Melaksanakan kegiatan pembangunan waduk dan rawa;

d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi waduk dan rawa;

e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi waduk dan rawa;

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Tugas : melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas : memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan sebagaimana Gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air

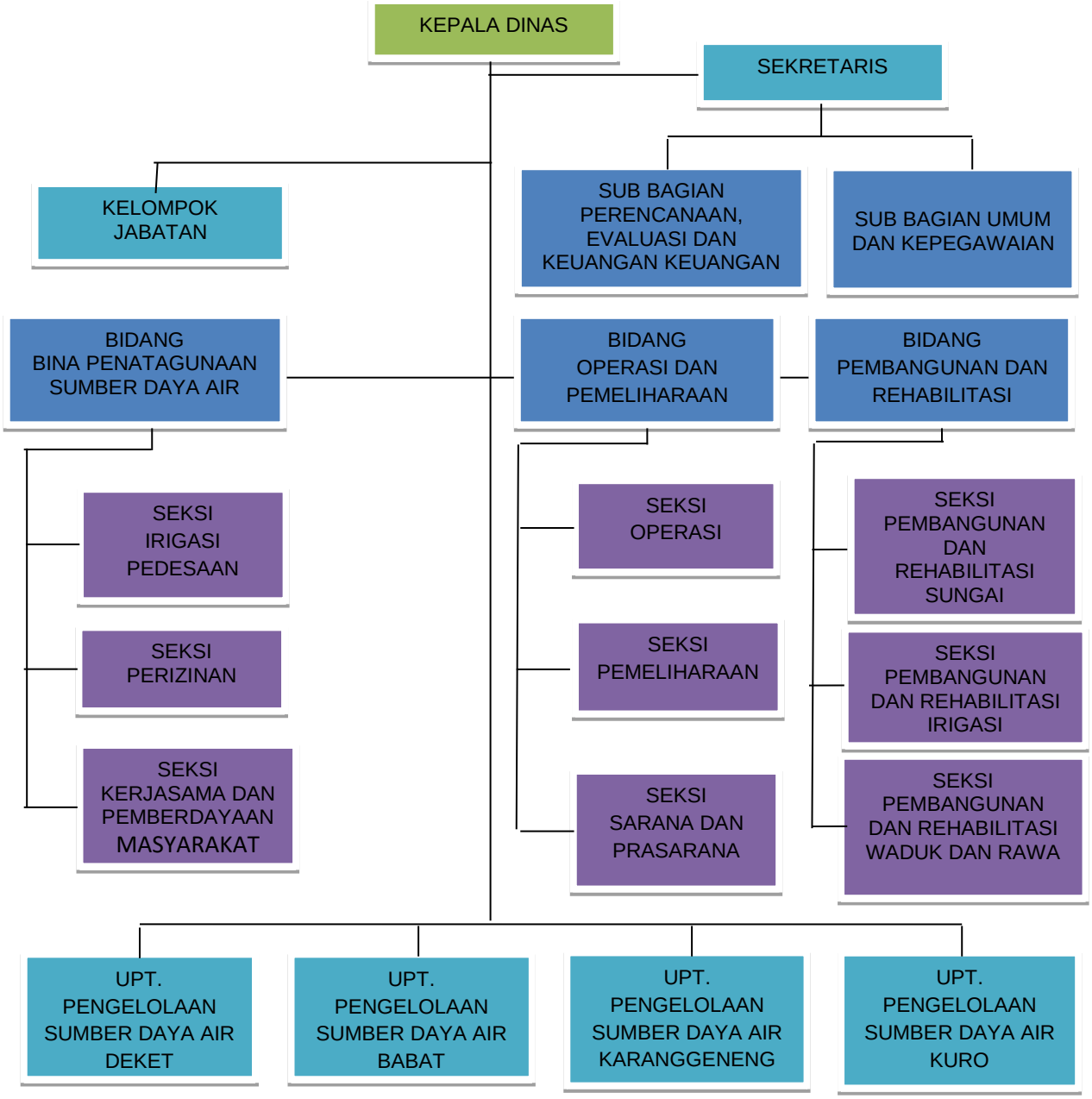

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan hingga akhir bulan Agustus tahun 2021 didukung sumber daya manusia dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

TABEL II.1 Klasifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	65	3	68
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	-	-	-
3	Tenaga kontrak	69	4	73
Jumlah		134	7	141

Sumber: Dinas PUSDA Lamongan, 2021

TABEL II.2 Klasifikasi ASN Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

NO	Golongan	Jumlah
1	IV	7
2	III	24
3	II	36
4	I	1
Jumlah		68

Sumber: Dinas PUSDA Lamongan, 2021

TABEL II.3 Klasifikasi SDM Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Pendidikan	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			Jumlah
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
SD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
SLTP	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
SLTA	-	-	-	1	7	2	13	14	-	2	-	-	-	-	-	39
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
S1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	4	-	-	-	20
S2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	-	6

Pendidikan	Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			Jumlah
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	
Jumlah	-	-	-	2	7	4	13	14	5	6	7	4	5	1	-	68

Sumber: Dinas PUSDA Lamongan, 2021

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Aset berupa Sarana dan prasarana penunjang terhadap kebutuhan dan tugas-tugas pokok dan fungsi DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR Kabupaten Lamongan secara minimal telah tercukupi, namun untuk pelaksanaan kedepan untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, maka perlu ditunjang dengan adanya prasarana pendukung. Adapun sarana dan prasarana sampai bulan Agustus 2021 terdiri dari :

TABEL II.4 Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	AC (Air Conditioner) Split	16
2	Alat Pemadam /Portable (Alat Pemadam / Portable	3
3	Af Generator Tone Generator (Global Postioning System)	2
4	Amplifier (Handy Talky (HT))	20
5	Audiosystem	5
6	Camera + Attachmen (kamera)	42
7	Kamera Drone ()	2
8	Clawler Excavator (Clawler Excavator)	12
9	Dispencer (Dispenser)	1
10	Display (Monitor/Display)	1
11	Filling Besi/Metal (- Filling Besi/Metal)	15
12	Garpu Kayu (Lain-lain)	3
13	Gergaji (Lain-lain)	2
14	Kipas Angin ()	24
15	Komparator	2
16	Kursi Kerja Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	1
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III (Kursi Kerja Pejabat Eselon III)	2

No	Nama	Jumlah (Unit)
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Eselon IV)	2
19	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kerja Pejabat Eselon IV)	2
20	Kursi Krja Pegawai Non Struktural (Kursi Kerja Pegawai Non Struktural)	3
21	Kursi Rapat (Kursi Rapat)	119
22	Kursi Staff ()	199
23	Alat GPS	2
24	Facsimile	1
25	LED TV	2
26	Mesin Potong rumput	8
27	Meteran Laser	4
28	Pompa Air	25
29	Prahu Kayu	1
30	sonsistem rakitan	1
31	Lap Top (Lap Top)	2
32	LCD Proyektor ()	5
33	Lemari Arsip ()	6
34	Lemari Kayu (Meja Tulis)	17
35	Papan Larangan (Papan larangan)	41
36	Magnetic tape Unit (Hard Disk)	13
37	Meja kayu/Rotan (Kursi Lipat)	6
38	Meja Kerja Pegawai Non struktural (Meja Kerja Pegawai Non Struktural)	3
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II (Meja Kerja Pejabat Eselon II)	1
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III (Meja Kerja Pejabat Eselon III)	4
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	3
42	Meja Kerja Pejabat Eselon IV (Meja Kerja Pejabat Eselon IV)	12
43	Meja Kerja Staf (Kursi Kerja Staf)	5
44	Meja Pelayanan ()	1
45	Meja Rapat (meja rapat)	33
46	Mesin Absensi (Mesin Absensi)	1
47	Mesin Gergaji ()	5
48	Mesin Ketik Manual	5

No	Nama	Jumlah (Unit)
49	Mesin Potong Rumput ()	19
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah) (Mobil)	2
51	Monitor (Monitor)	2
52	Motor Boat (Motor Boat)	3
53	Motor Roda Tiga (New Karya 150 RL)	1
54	Note Book (Note Book)	55
55	P.C. Unit (P.C Unit)	40
56	Papan Nama Instansi (Papan Nama Instansi)	2
57	Papan Tulis (Papan Tulis)	1
58	Perkakas kantor ()	58
59	Pick Up (Pick Up)	1
60	Printer (Printer)	69
61	Proyektor + Attachment (Proyektor+Attachment)	2
62	Rak Besi/Metal (Krisbow)	4
63	Router (Router)	3
64	Scanner (Scanner)	3
65	Sepeda Motor ()	52
66	Station Wagon (Station Wagon)	5
67	Truck +Attachment (Truck + Attachment)	3
68	Unit Transcarver/Transmiter UHF (Pesawat Telephone)	4
69	Wheel Excavator (Wheel Excavator)	8
70	Lain-Lain	15

Sumber: Kartu Inventaris Dinas PUSDA, 2021

TABEL II.5 Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	UPT Deket	1	1	-	
2	UPT Karanggeneng	1	1	-	
3	UPT Kuro	1	1	-	
4	UPT Babat	1	1	-	

TABEL II.6 Jenis Dan Jumlah Sarana Gedung Dan BangunanDinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KONDISI		KET.
			BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24	24	-	
2	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	3	-	
3	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	2	-	2	
4	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen	52	35	17	
5	Gedung Garasi	1	1	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) diketahui dengan mengevaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (PD) periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah (PD) periode sebelumnya (2016 – 2021), terlihat pada table berikut :

TABEL II.7 Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target					Realisasi					Rasio				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
% Ketersediaan Air Baku				76 %	77 %	78 %	79 %	80 %	76,57 %	77,62 %	78,64 %	79,17 %	-	100,75	100,81	100,82	100,22	-
% Area Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam				71 %	73 %	75 %	78 %	81 %	71,85 %	73,95 %	76,05 %	79,63 %	-	101,20	101,30	101,40	102,09	-
% Area Bebas Genangan Banjir				25 %	27 %	30 %	32 %	33 %	25,86 %	27,96 %	30,99 %	32,11 %	-	103,44	103,56	103,30	100,34	-
Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.			SDGs	8 WS	8 WS	8 WS	8 WS	8 WS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.			SDGs	10 WS	10 WS	10 WS	10 WS	10 WS	1	1	1	1	-	10	10	10	10	-
Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.			SDGs	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		100	100	100	100	-

Untuk indikator kinerja yang berdasar pada target indikator SDGs, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan mampu melaksakan dua indikator. Realisasi dari indikator "Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau" Dinas PU. Sumber Daya Air dapat melaksanakan 1 (satu) kegiatan di setiap tahunnya, hal ini dikarenakan Kabupaten Lamongan hanya memiliki 1 wilayah sungai yaitu wilayah sungai (WS) Bengawan Solo. Sedangkan pada indikator "Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air" memang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Dinas PU. Sumber Daya Air sehingga realisasi indikator tersebut dapat terpenuhi 100%. Dan untuk indikator SDGs yang tidak terpenuhi realisasinya adalah "Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk", hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan yang berbasis teknologi informasi pada tahun 2017-2020.

Kemudian Tabel dibawah menunjukkan tentang rasio antara realisasi dan anggaran selama lima tahun:

TABEL II.8 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

URAIAN	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Tidak Langsung	6.451.690.000	6.224.330.000	6.166.700.000	6.785.494.500	-	6.340.213.668	5.888.001.160	5.921.580.000	5.971.824.050	-	94,60	96,03	98,33	98,33	-
Belanja Langsung	45.962.935.599	68.454.765.599	43.389.729.000	30.478.874.350	-	45.616.188.605	67.323.561.583	42.208.586.615	26.954.465.119	-	99,25	98,35	97,28	73,15	-
Total Belanja	**52.414.625.599**	**74.679.095.599**	**49.556.429.000**	**37.264.368.850**	**-**	**51.956.402.273**	**73.211.562.743**	**48.130.166.615**	**32.926.289.169**	**-**	**99,13**	**98,03**	**97,12**	**88,36**	**-**

Sumber: Sub Bagian Keuangan DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR Agustus Tahun 2021

TABEL II.9 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan

Kegiatan	Target					Realisasi					Rasio				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1.132.813.999**	**1.477.119.799**	**1.793.229.000**	**1.894.410.000**	**-**	**1.019.425.310**	**1.198.582.033**	**1.590.625.080**	**1.568.105.637**	**-**	**89,99**	**81,14**	**88,70**	**82,78**	**-**
Penyediaan Jasa Perkantoran	824.788.999	1.203.028.599	1.503.229.000	1.778.410.000	-	711.471.310	924.586.733	1.300.694.680	1.452.179.692	-	86,26	76,85	86,53	81,66	-
Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran	245.025.000	204.091.200	210.000.000	100.000.000	-	244.954.000	204.078.300	209.988.600	99.925.945	-	99,97	99,99	99,99	99,93	-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	63.000.000	70.000.000	80.000.000	16.000.000	-	63.000.000	69.917.000	79.941.800	16.000.000	-	100,00	99,88	99,93	100,00	-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**493.000.000**	**512.000.000**	**285.855.000**	**275.000.000**	**-**	**492.775.000**	**511.025.000**	**285.555.000**	**273.470.000**	**-**	**99,95**	**99,81**	**99,90**	**99,44**	**-**

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	106.000.000	70.000.000	63.855.000	50.000.000	-	106.000.000	70.000.000	63.555.000	50.000.000	-	100,00	100,00	99,53	100,00	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	135.000.000	135.000.000	100.000.000	50.000.000	-	135.000.000	135.000.000	100.000.000	50.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	8.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	8.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	170.000.000	200.000.000	-	100.000.000	-	169.775.000	199.025.000	-	98.470.000	-	99,87	99,51	-	98,47	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	74.000.000	97.000.000	107.000.000	60.000.000	-	74.000.000	97.000.000	107.000.000	60.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**-**	**65.750.000**	**35.000.000**	**-**	**-**	**-**	**65.000.000**	**34.700.000**	**-**	**-**	-				**-**
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	65.750.000	35.000.000	-	-	-	65.000.000	34.700.000	-	-	-				-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**-**	**43.800.000**	**11.500.000**	**-**	**-**	**-**	**22.904.000**	**11.475.000**	**-**	**-**	-				**-**
Pendidikan Dan Pelatihan Formal	-	43.800.000	11.500.000	-	-	-	22.904.000	11.475.000	-	-	-				-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	**65.000.000**	**65.000.000**	**100.000.000**	**110.000.000**	**-**	**64.993.000**	**65.000.000**	**99.983.100**	**103.550.000**	**-**	**99,99**	**100,00**	**99,98**	**94,14**	**-**
Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala	15.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000	-	14.997.000	15.000.000	40.000.000	37.600.000	-	99,98	100,00	100,00	94,00	-
Penyusunan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi.	30.000.000	35.000.000	40.000.000	50.000.000	-	30.000.000	35.000.000	39.983.100	47.550.000	-	100,00	100,00	99,96	95,10	-

Forum OPD	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	-	19.996.000	15.000.000	20.000.000	18.400.000	-	99,98	100,00	100,00	92,00	-
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	**22.351.948.000**	**27.144.687.000**	**19.235.145.000**	**12.458.419.750**	**-**	**22.178.588.950**	**26.514.543.500**	**18.325.368.435**	**10.155.350.383**	**-**	**99,22**	**97,68**	**95,27**	**81,51**	**-**
Pembangunan Pintu Air	-	400.000.000	2.380.000.000	780.396.000	-	-	399.180.000	2.371.663.000	607.501.000	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	1.126.000.000	1.688.145.000	2.498.565.000	-	-	1.122.487.000	1.681.757.000	2.325.420.000	-	-	99,69	99,62	93,07	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air	2.355.000.000	1.437.000.000	2.642.000.000	1.502.771.500	-	2.350.980.000	1.427.615.000	2.631.444.000	1.166.199.500	-	99,83	99,35	99,60	77,60	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	2.084.348.000	5.815.000.000	7.315.000.000	4.076.687.250	-	2.076.211.000	5.804.350.000	7.297.055.000	3.261.624.650	-	99,61	99,82	99,75	80,01	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.	6.748.000.000	5.899.000.000	-	-	-	6.729.949.950	5.886.149.000	-	-	-	99,73	99,78	-	-	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	155.000.000	-	-	-	-	150.502.500	-	-	-	-	97,10	-	-	-
Pendamping Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi	175.000.000	-	-	-	-	171.720.000	-	-	-	-	98,13	-	-	-	-
Pemberdayaan Petani Pemakai Air	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana Alokasi Khusus).	6.345.000.000	5.800.687.000	5.210.000.000	3.600.000.000	-	6.214.366.000	5.345.624.000	4.343.449.435	2.794.605.233	-	97,94	92,16	83,37	77,63	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai (Bantuan Keuangan Provinsi).	3.000.600.000	-	-	-	-	2.996.042.000	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-

Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air (Bantuan Keuangan Propinsi).	520.000.000	1.320.000.000	-	-	-	517.795.000	1.315.314.000	-	-	-	99,58	99,65	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun (Bantuan Keuangan Propinsi).	1.064.000.000	2.967.000.000	-	-	-	1.061.525.000	2.960.512.000	-	-	-	99,77	99,78	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Bantuan Keuangan Propinsi).	-	1.325.000.000	-	-	-	-	1.321.910.000	-	-	-	-	99,77	-	-	-
Pembangunan Pintu Air (Bantuan Keuangan Propinsi)	-	900.000.000	-	-	-	-	780.900.000	-	-	-	-	86,77	-	-	-
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	**10.409.770.000**	**9.225.408.800**	**15.510.000.000**	**13.845.676.000**	**-**	**10.384.117.000**	**9.195.706.800**	**15.456.404.000**	**13.048.381.200**	**-**	**99,75**	**99,68**	**99,65**	**94,24**	**-**
Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya.	2.590.500.000	1.932.000.000	1.285.000.000	1.363.600.000	-	2.584.540.000	1.928.585.000	1.280.263.000	1.361.178.622	-	99,77	99,82	99,63	99,82	-
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.	7.123.270.000	2.881.908.800	4.688.000.000	4.193.473.000	-	7.105.172.000	2.875.333.800	4.669.703.000	3.888.233.000	-	99,75	99,77	99,61	92,72	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya.	280.000.000	300.000.000	380.000.000	-	-	280.000.000	299.350.000	379.160.000	-	-	100,00	99,78	99,78	-	-
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Koordinasi dan Penertiban Pengelolaan Aset-Aset SDA	-	-	25.000.000	-	-	-	-	24.975.000	-	-	-	-	99,90	-	-
Sosialisasi Pengelolaan Aset dan Perijinan	-	50.000.000	85.000.000	-	-	-	50.000.000	84.800.000	-	-	-	100,00	99,76	-	-

Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.	-	45.000.000	-	-	-	-	44.800.000	-	-	-	-	99,56	-	-	-
Operasional Komisi Irigasi	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun.	-	-	8.498.000.000	5.868.234.400	-	-	-	8.468.592.000	5.564.650.678	-	-	-	99,65	94,83	-
Pembinaan bagi GHIPPA	-	-	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-
Pendampingan bagi HIPPA/GHIPPA	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bantuan Keuangan Propinsi).	251.000.000	2.790.000.000	-	-	-	249.790.000	2.781.578.000	-	-	-	99,52	99,70	-	-	-
Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya (Bantuan Keuangan Propinsi).	165.000.000	848.000.000	-	-	-	164.615.000	846.560.000	-	-	-	99,77	99,83	-	-	-
Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Partisipatif Secara Terpadu (IPDMIP).	-	198.500.000	474.000.000	2.420.368.600	-	-	189.500.000	473.911.000	2.234.318.900	-	-	95,47	99,98	92,31	-
Program Pengendalian Banjir	**9.342.000.000**	**10.976.000.000**	**6.419.000.000**	**1.807.368.600**	**-**	**9.286.130.000**	**10.831.772.000**	**6.404.476.000**	**1.805.607.900**	**-**	**99,40**	**98,69**	**99,77**	**99,90**	**-**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penaggulangan Banjir.	390.000.000	390.000.000	360.000.000	344.960.000	-	388.950.000	390.000.000	360.000.000	344.960.000	-	99,73	100,00	100,00	100,00	-
Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai.	990.000.000	950.000.000	980.000.000	724.920.000	-	988.230.000	949.800.000	977.075.000	724.920.000	-	99,82	99,98	99,70	100,00	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	7.962.000.000	2.725.000.000	4.899.000.000	553.525.000	-	7.908.950.000	2.592.586.000	4.887.801.000	552.165.900	-	99,33	95,14	99,77	99,75	-

Pengadaan Pompa Pengendali Banjir dan Sarana Pendukungnya.	-	2.061.000.000	-	-	-	-	2.058.198.000	-	-	-	-	99,86	-	-	-
Rehabilitasi atau Pemeliharaan alat-Alat Berat	-	-	180.000.000	183.963.600	-	-	-	179.600.000	183.562.000	-	-	-	99,78	99,78	-
Rehabilitasi Saluran Pembuang (Bantuan Keuangan Propinsi)	-	4.850.000.000	-	-	-	-	4.841.188.000	-	-	-	-	99,82	-	-	-
Program Peningkatan Sarana dan Alat Berat	**2.365.000.000**	**18.945.000.000**	**-**	**-**	**-**	**2.331.706.000**	**18.919.028.250**	**-**	**-**	**-**	**98,59**	**99,86**	**-**	**-**	**-**
Pengadaan Alat-Alat Berat	-	11.820.000.000	-	-	-	-	11.818.511.000	-	-	-	-	99,99	-	-	-
Pengadaan dan Instalasi Mesin Pompa Banjir	2.300.000.000	-	-	-	-	2.267.006.000		-	-	-	98,57	-	-	-	-
Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat – Alat Berat	65.000.000	85.000.000	-	-	-	64.700.000	84.700.000	-	-	-	99,54	99,65	-	-	-
Pengadaan Alat-Alat Angkutan Kendaraan Bermontor	-	1.620.000.000	-	-	-	-	1.610.314.750	-	-	-	-	99,40	-	-	-
Pembangunan Garasi Alat - Alat Berat	-	840.000.000	-	-	-	-	835.625.000	-	-	-	-	99,48	-	-	-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pompa Pengendali Banjir	-	160.000.000	-	-	-	-	159.700.000	-	-	-	-	99,81	-	-	-
Pengadaan Alat-Alat Berat (Dana Insentif Daerah)	-	4.420.000.000	-	-	-	-	4.410.177.500	-	-	-	-	99,78	-	-	-

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD provinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas PU. Sumber Daya Air yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas PU. Sumber Daya Air berdasarkan tugas pokok fungsi teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Luas area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam belum merata	Belum optimalnya penyediaan air baku irigasi untuk mencukupi kebutuhan pertanian	Menurunnya kapasitas tampungan waduk dan tempat penampung air lainnya akibat sedimentasi.	Belum optimalnya kegiatan pengerukan embung/telaga/tempat penampung air lainnya	• Sedimentasi dikarenakan kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan
			Belum optimalnya kapasitas jaringan irigasi sehingga terjadi kehilangan air pada saluran irigasi	Kerusakan pada jaringan irigasi yang belum tertangani dan adanya penyempitan saluran serta kurangnya bangunan pengatur	• Tingginya laju sedimentasi pada saluran irigasi • Belum optimalnya penggunaan database jaringan irigasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi • Kurangnya peran serta HIPPA dalam merawat jaringan irigasi
			Kurangnya kesadaran petani akan pentingnya koordinasi dalam Forum HIPPA/GHIPPA	Belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA	• Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap penerapan RTTG masih rendah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah	Faktor-faktor yang mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
			Terbatasnya SDM di tingkat wilayah (Juru Pengairan)	Juru Pengairan memasuki masa purna tugas/pensiun	Tidak adanya rekruitmen tenaga PNS berijazah SMA/Sederajat
		belum optimalnya pengendalian banjir di daerah rawan banjir	Lamanya genangan banjir diwilayah Bengawan jero	Belum adanya *masterplan* yang tepat dan efisien dalam pengendalian banjir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan fisik	• Tingginya curah hujan • Banjir di daerah ini karena faktor goegrafis suatu daerah berada di cekungan dan cenderung lebih rendah elevasinya.
			Terhambatnya aliran air pada sungai/kali/saluran pembuang	• Belum optimalnya kegiatan sosialisasi dan partisipasi pengelolaan aset dan perijinan SDA • Adanya sedimentasi dan penyempitan pada kali/sungai/saluran pembuang	Terdapatnya bangunan liar yang menyebabkan penyempitan lahan kali/sungai/saluran sebagai saluran pembuang yang berfungsi untuk pengendalian banjir.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan

Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, maka berubah pula Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Lamongan periode 2021-2026, adalah

"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholders dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kejayaan Lamongan** adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur.
2. **Berkeadilan** adalah suatu kondisi dimana Kabupaten Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah

Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan.

Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religious-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram.

Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas PU. Sumber Daya dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 3, seperti yang tertera pada tabel berikut:

TABEL III.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
1	**Visi**: "Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"	Merumuskan kebjakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air	Luas area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam belum merata	1 Terjadinya sedimentasi pada waduk/embung/telaga dan tempat penampung air lainnya.	1 Meningkatkan pengelolaan Sumber Air Baku dengan upaya konservasi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi waduk/embung dan tempat penampung air lainnya
	Misi Ke-3: "Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan"			2 Terjadinya perubahan fungsi lahan irigasi menjadi bangunan liar sehingga mengubah jaringan irigasi yang ada	2 Adanya teknologi terkait pengelolaan aset irigasi (E-PAKSI) yang dapat diterapkan untuk penyusunan data base jaringan irigasi.
	Tujuan: "Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan"			3 Jumlah tenaga dan SDM yang terbatas di tingkat wilayah (Juru Pengairan)	3 Meningkatkan kegiatan normalisasi sungai/saluran pembuang serta meningkatkan kegiatan O&P Kanal Banjir
				4 Terjadinya perubahan Fungsi menjadi bangunan liar sehingga terjadinya penyempitan lahan kali/sungai/saluran sebagai saluran pembuang yang berfungsi untuk pengendalian banjir.	4 Meningkatkan kegiatan sosialisasi kesadaran masyarakat dan penetapan lahan tampungan untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat bangunan penampung air

No	Visi / Misi / Program Kerja Bupati / Wakil Bupati	Tupoksi PD	Permasalahan PD	Faktor	
				Penghambat PD	Pendukung PD
	Sasaran: "Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata".			5 Belum adanya *masterplan* yang tepat dan efisien dalam pengendalian banjir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan fisik	5 Meningkatkan kapasitas dan fungsi jaringan irigasi dengan kegiatan normalisasi jaringan irigasi, pembangunan/rehabilitasi bangunan pengatur air serta O&P jaringan irigasi
	Indikator: "Indeks Infrastruktur". **Program Prioritas Pada RPJMD:** "Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)".			6 Sedimentasi pada saluran 7 irigasi Kehilangan air pada saluran irigasi	6 Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap Renstra Kementerian PUPR, karena Dinas PU. Sumber Daya Air mempunyai tugas yang sama dengan

Kementerian PUPR, khususnya Pengelolaan di bidang Sumber Daya Air. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah dan kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR di tahun rencana dengan tugas pokok fungsi Dinas PU. Sumber Daya Air, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PU. Sumber Daya Air ditinjau dari sasaran jangka menengah dan kebijakan Renstra Kementerian PUPR. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra Kementerian PUPR:

TABEL III.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA

Renstra Kementrian	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran jangka menengah Renstra Kementrian PUPR (Direktorat Jenderal SDA)			
1 Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air **Indikator**:	Luas area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam belum merata	1 Terjadinya sedimentasi pada waduk/embung/telaga dan tempat penampung air lainnya.	1 Meningkatkan pengelolaan Sumber Air Baku dengan upaya konservasi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi waduk/embung dan tempat penampung air lainnya
a. Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat		2 Terjadinya perubahan fungsi lahan irigasi menjadi bangunan liar sehingga mengubah jaringan irigasi yang ada	2 Adanya teknologi terkait pengelolaan aset irigasi (E-PAKSI) yang dapat diterapkan untuk penyusunan data base jaringan irigasi.
b. Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat		3 Jumlah tenaga dan SDM yang terbatas di tingkat wilayah (Juru Pengairan)	3 Meningkatkan kegiatan normalisasi sungai/saluran pembuang serta meningkatkan kegiatan O&P Kanal Banjir
c. Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.		4 Terjadinya perubahan Fungsi menjadi bangunan liar sehingga terjadinya penyempitan lahan kali/sungai/saluran sebagai saluran	4 Meningkatkan kegiatan sosialisasi kesadaran masyarakat dan penetapan lahan tampungan untuk menjaga keberlanjutan

Renstra Kementrian		Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
			pembuang yang berfungsi untuk pengendalian banjir.	fungsi dan manfaat bangunan penampung air
			5 Belum adanya *masterplan* yang tepat dan efisien dalam pengendalian banjir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan fisik	5 Meningkatkan kapasitas dan fungsi jaringan irigasi dengan kegiatan normalisasi jaringan irigasi, pembangunan/rehabilitasi bangunan pengatur air serta O&P jaringan irigasi
			6 Sedimentasi pada saluran irigasi 7 Kehilangan air pada saluran irigasi	6 Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik

Demikian pula halnya dengan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Propinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah Dinas PU. Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifakasi pada tabel.III.4

TABEL III.4 TELAAH RENSTRA DINAS PU. SDA PROVINSI JAWA TIMUR

Renstra Provinsi	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sasaran jangka menengah Renstra Provinsi			
1 Meningkatnya ketahanan air sektor ekonomi dan kebencanaan **Indikator**:	Luas area baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam belum merata	1 Terjadinya sedimentasi pada waduk/embung/telaga dan tempat penampung air lainnya.	1 Meningkatkan pengelolaan Sumber Air Baku dengan upaya konservasi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi waduk/embung dan tempat penampung air lainnya
a. Indeks Ketahanan Air		2 Terjadinya perubahan fungsi lahan irigasi menjadi bangunan liar sehingga mengubah jaringan irigasi yang ada	2 Adanya teknologi terkait pengelolaan aset irigasi (E-PAKSI) yang dapat diterapkan untuk penyusunan data base jaringan irigasi.
2 Bertambahnya Jumlah Bangunan Utama dan Panjang Saluran Pembawa/Pembuang yang diperbaiki **Indikator:**		3 Jumlah tenaga dan SDM yang terbatas di tingkat wilayah (Juru Pengairan)	3 Meningkatkan kegiatan normalisasi sungai/saluran pembuang serta meningkatkan kegiatan O&P Kanal Banjir
% Kondisi fisik prasarana irigasi dalam kondisi baik		4 Terjadinya perubahan Fungsi menjadi bangunan liar sehingga terjadinya penyempitan lahan kali/sungai/saluran sebagai saluran pembuang yang berfungsi untuk pengendalian banjir.	4 Meningkatkan kegiatan sosialisasi kesadaran masyarakat dan penetapan lahan tampungan untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat bangunan penampung air

Renstra Provinsi	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
3 Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat **Indikator:** % tersedianya air irigasi untuk pertanian pada Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi		5 Belum adanya *masterplan* yang tepat dan efisien dalam pengendalian banjir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan fisik 6 Sedimentasi pada saluran irigasi 7 Kehilangan air pada saluran irigasi	5 Meningkatkan kapasitas dan fungsi jaringan irigasi dengan kegiatan normalisasi jaringan irigasi, pembangunan/rehabilitasi bangunan pengatur air serta O&P jaringan irigasi 6 Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik
4 Menurunnya kejadian banjir di sungai-sungai yang rawan setelah pembangunan parapet dan normalisasi **Indikator:** % Penurunan Jumlah Desa yang terdampak Kerugian akibat kejadian banjir			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan mempunyai faktor – faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengarui Pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air itu sendiri ditinjau dari segi RTRW dan KLHS. Kabupaten Lamongan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 – 2039.

Dimana permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberasilan Penangannya terdapat pada tabel III.5

TABEL III.5 TELAAH KLHS PADA RENSTRA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Kebijakan struktur ruang wilayah Kabupaten Lamongan	Merumuskan kebjakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Air	1 Kebijakan struktur ruang wilayah di Bidang Sumber Daya Air belum direalisasikan secara optimal terutama terkait alih fungsi lahan	- penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA belum optimal	- Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana		2 belum optimalnya pengendalian banjir di daerah rawan banjir	- Belum optimalnya penggunaan database jaringan irigasi sebagai acuan dalam	- Adanya teknologi terkait pengelolaan aset irigasi (E-PAKSI) yang
Sistem Jaringan				

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Sumberdaya Air			pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	dapat diterapkan untuk penyusunan data base jaringan irigasi.
- Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Provinsi Jawa Timur				
- Rencana Pemantapan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten			- Terjadinya perubahan fungsi menjadi bangunan liar sehingga terjadinya penyempitan lahan kali/sungai/saluran sebagai saluran pembuang yang berfungsi untuk pengendalian banjir.	- Meningkatkan pengelolaan Sumber Air Baku dengan upaya konservasi, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi waduk/embung dan tempat penampung air lainnya
- Pemeliharaan DAS				
- Penataan Sistem Jaringan Bengawan Jero				
- Normalisasi Sungai/Kali			- Menurunnya Usia guna waduk dan tempat penampung air lainnya yang lebih cepat dari rencana	- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kesadaran masyarakat dan penetapan lahan tampungan untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat bangunan penampung air
-Normalisasi dan pengembangan waduk dan rawa				
- Pelestarian dan pengendalian cekungan air tanah				
- Rencana Pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) Kewenagan Kabupaten			-	
- Rencana Pengembangan Pengendali Banjir				
Sistem Jaringan Drainase				

Kebijakan Program RTRW	Tupoksi Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Rencana Pengembangan, Pemeliharaan Jaringan Jaringan Primer				
Perwujudan Pola Ruang				
Perwujudan Kawasan Lindung				
Kawasan Perlindungan setempat				
Perlindungansempadan sungai				
Perlindungan Waduk				
Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)				
Pemantapan Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategi Sumber Daya Air dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup				
Pemeliharaan Sungai Lintas Provinsi				

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Adapun telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator Pembangunan Berkelanjutan pada KLHS RPJMD (kategori masih belum tercapai dan butuh upaya) yang menjadi tanggung jawab Dinas PU. Sumber Daya Air dengan tugas pokok fungsi Dinas PU. Sumber Daya Air, sehingga dapat di identifikasi faktor penghambat serta faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PU. Sumber Daya Air ditinjau dari implikasi KLHS RPJMD. Berikut disajikan matriks hasil telaahan KLHS RPJMD:

TABEL III.6 TELAAH KLHS PADA RENSTRA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

Kebijakan KLHS	Permasalahan PD	Faktor Penghambat PD	Faktor Pendukung PD
Permasalahan dan isu strategis yang menjadi tanggung jawab Dinas PU. Sumber Daya Air:	- Belum tersedianya database tentang aset sumber daya air sebagai acuan perencanaan pengelolaan dan pengembangan SDA yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air	- Belum optimalnya teknologi terkait pengelolaan aset irigasi yang dapat diterapkan untuk penyusunan data base irigasi.	- Mengoptimalkan teknologi terkait pengelolaan aset irigasi (E-PAKSI) yang dapat diterapkan untuk penyusunan data base jaringan irigasi.
- Perlunya peningkatan jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk - Perlunya peningkatan jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau		- penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA belum optimal	- Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik

3.5 Penentuan Isu- Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu-isu strategis, perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Dinas PU. Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD. Dari hasil analisis dan telaahan tersebut diatas, identifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut ditapis untuk dikelompokkan yang sejenis untuk dirumuskan menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan air baku irigasi untuk mencukupi kebutuhan pertanian
2. Belum adanya *masterplan* yang tepat dan efisien dalam pengendalian banjir yang dapat dijadikan bahan pertimbangan penentuan skala prioritas pelaksanaan kegiatan fisik
3. Belum tersedianya database tentang aset sumber daya air sebagai acuan perencanaan pengelolaan dan pengembangan SDA yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air
4. Adanya pengembangan potensi kapasitas SDM dari tingkat GHIPPA, Juru pengairan hingga tingkat PPA yang bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dan memaksimalkan potensi yang ada dengan baik.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka terwujudnya perencanaan yang terintegrasi, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah serta menerjemahkan Sasaran (IKD) yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Periode 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Sasaran RPJMD merupakan hasil yang diharapkan oleh Kepala Daerah. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara secara langsung yakni Misi 3 "**Membangun infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan".** Fokus misi ke tiga adalah Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Layanan Infrastruktur. Dalam rangka mewujudkan kepuasan atas kinerja infrastruktur, pemerintah akan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan konektifitas infrastruktur yang merata, pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian terhadap resiko bencana. Sebagai upaya untuk mencapai Misi 3 yakni **"Infrastruktur Handal dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan.",** maka ditetapkan tujuan pembangunannya adalah "**Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan".** Kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Cascading* yang disajikan sebagai berikut:

GAMBAR IV.1 CASCADING MISI III PADA RPJMD TAHUN 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi III RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni **"Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas Dan Merata"** dengan indikator Indeks Infrastruktur. Sehingga tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air adalah "**Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata**".

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian.
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* yang disajikan sebagai berikut:

GAMBAR IV.2 CASCADING RENSTRA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR TAHUN 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta penanggung jawab pelaksanaan capaian kinerja pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

GAMBAR IV.3 KESELARASAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENSTRA DINAS PU. SUMBER DAYA AIR TAHUN 2021-2026

CASCADING DINAS PU. SUMBER DAYA AIR

Sasaran PD	**1. Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian**	**2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah**
Indikator Sasaran PD	**Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam**	**Nilai SAKIP Dinas PU. Sumber Daya Air**
Program PD	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Indikator Program PD	Persentase ketersediaan air baku Persentase Luas Area Bebas Genangan banjir Banjir Persentase Jaringan irigasi berkondisi Baik	**Nilai IKM Dinas PU. Sumber Daya Air**
Kegiatan PD	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **Indikator:** - *Volume ketersediaan air baku* - *Luas area bebas genangan banjir* 1. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam satu daerah Kab/Kota **Indikator:** *Panjang jaringan irigasi kondisi baik*	1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja perangkat daerah **Indikator :** *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu* 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, **Indikator :** *Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu* 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, **Indikator :** *Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik* 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, **Indikator :** *Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan* 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, **Indikator :** *Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan* 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, **Indikator :** *Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik* 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah, **Indikator :** *Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik*
Penanggung Jawab	Bidang Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Sekretariat

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET KERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata	-	Indeks Infrastruktur Irigasi	76,43%	75,30%	75,62%	75,86%	76,26%	76,49%	76,49%
		Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	79,63%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	86,00 %
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas PU. Sumber Daya Air	86,76%	87,01%	87,26%	87,51%	87,76%	88,01%	88,01%

TABEL IV.2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	KONDISI AWAL KINERJA	KONDISI AKHIR
Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata	Indeks Infrastruktur Irigasi	Indikator ini menghitung indikator kinerja organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari indeks jaringan irigasi berkondisi baik dan indeks ketersediaan air baku	$\frac{\text{Indeks Jaringan Irigasi + Indeks Air Baku}}{\text{Jumlah Indeks}}$	76,43%	76,49%

SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET					
						2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam / Jumlah Baku Sawah X 100 %	Indikator ini menghitung luas baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam di wilayah Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten	Luas Baku sawah Irigasi	79,63%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	86,00%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Penilaian dari Inspektorat	**Nilai Sakip** merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	RENSTRA, RENJA LKjIP	86,76%	87,01%	87,26%	87,51%	87,76%	88,01%	88,01%

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET					
						2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase Ketersediaan Air Baku	Jumlah Air Baku Yang Ada / Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan X 100 %	yang dimaksud dengan air baku pada indikator ketersediaan air baku adalah ketersediaan air baku untuk pertanian, **air baku** adalah sumber air yang terdapat dipermukaan tanah seperti sungai, waduk, embung/telaga yang merupakan tampungan air hujan.	1. Data Tampungan Waduk/ Rawa 2. Data Kebutuhan Air Irigasi Pertanian	79,17%	80,5%	81,0%	81,5%	82,0%	82,5%	82,5%
	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	panjang jaringan irigasi berkondisi baik / jumlah panjang jaringan irigasi X 100 %	**Jaringan irigasi** adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.	1. Data Jaringan Irigasi 2. Luas Baku sawah Irigasi 3. Laporan Kinerja Jaringan Irigasi.	68,05%	71,05%	72,55%	74,05%	75,55%	77,05%	77,05%

PROGRAM	INDIKATOR	FORMULASI	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET					
						2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	$\frac{\text{Luas Bebas Genangan Banjir}}{\text{Luas area Rawan Genangan Banjir}}$ X 100 %	Indikator ini menghitung luas area bebas genangan banjir pada daerah rawan genangan banjir	1. Data Hidrologi 2. Data Debit Sungai 3.Laporan Luas Genangan bebas banjir	32,11%	28,56%	29,56%	30,56%	31,56%	32,56%	32,56%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Dinas PU. Sumber Daya Air	Nilai Interval SKM	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PU. Sumber Daya Air	Survey Kepuasan Masyarakat	82 %	84%	85 %	86 %	87 %	88%	88%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy-focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horizon waktunya dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inherent dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

TABEL V.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan			
Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Meningkatkan Infrastruktur untuk Menjamin Ketersediaan Air Baku pada saat Musim Tanam serta melakukan tindakan pngendalian Banjir	Menyusun dan Melaksanakan Program Peningkatan Pengelolaan Air Baku Pertanian
			Naturalisasi dan Normalisasi Bangunan Penampung Air
			Melakukan Pemetaan Aset Sumber Daya Air
			Meningkatkan Efektifitas Pembangunan, Rehabilitasi, dan Normalisasi Jaringan Irigasi
			Menyusun dan Melaksanakan Sistem Pengendalian Banjir Yang Tepat dan Efisien
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Peningkatan Kualitas Suber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana	Mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Secara Berkala
			Pengembangan Potensi Kapasitas SDM di Berbagai Tingkatan

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah diinisiasi, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasn terhadap RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan ketersediaan air baku	Menyusun dan melaksanakan program peningkatan pengelolaan air baku pertanian	√	√	√	√	√
		Naturalisasi dan normalisasi bangunan penampung air	√	√	√	√	√
		Melakukan pemetaan aset sumber daya air	√	√	√	√	√
		Meningkatkan efektifitas pembangunan, rehabilitasi, dan normalisasi jaringan irigasi	√	√	√	√	√
		Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian banjir yang tepat dan efisien	√	√	√	√	√

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program dan kegiatan tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut:

GAMBAR VI.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PU.SDA KABUPATEN LAMONGAN

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata		1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**37.023.442.601**		**43.494.037.238**		**44.146.447.797**		**44.808.644.514**		**45.630.774.182**		45.630.774.182		Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Dinas PU. Sumber Daya Air	82%	84 %	**10.932.439.501**	85 %	**10.998.034.138**	86%	**11.163.004.650**	87%	**11.330.449.720**	88%	**11.500.406.466**	88%	11.500.406.466	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2.01		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu**	**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**92.500.000**		**92.500.000**		**92.500.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		100.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	7 dokumen	7 dokumen	37.500.000	7 dokumen	37.500.000	7 dokumen	37.500.000	7 dokumen	40.000.000	7 dokumen	40.000.000	7 dokumen	40.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	27.500.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	4 dokumen	30.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**21 Dokumen**	**21 Dokumen**	**7.564.668.453**		**7.597.372.138**		**7.615.592.650**		**7.620.949.720**		**7.627.406.466**		7.627.406.466		
		1	03	01	'2.02	01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	72 ASN	72 ASN	7.482.168.453	72 ASN	7.514.872.138	72 ASN	7.533.092.650	72 ASN	7.530.949.720	72 ASN	7.537.406.466	72 ASN	7.537.406.466	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.02	07	koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	18 dokumen	18 dokumen	27.500.000	18 dokumen	27.500.000	18 dokumen	27.500.000	18 dokumen	30.000.000	18 dokumen	30.000.000	18 dokumen	30.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							steran SKPD																
		1	03	01	'2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	27.500.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian dengan baik**	**100%**		**72.500.000**		**72.500.000**		**117.500.000**		**120.000.000**		**130.000.000**		130.000.000		
		1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	150 potong	0	150 potong	0	150 potong	45.000.000	150 potong	45.000.000	150 potong	50.000.000	150 potong	50.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang dilaksanakan	-	5 kegiatan	72.500.000	5 kegiatan	72.500.000	5 kegiatan	72.500.000	5 kegiatan	75.000.000	5 kegiatan	80.000.000	5 kegiatan	80.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik**	**100%**		**144.627.501**		**147.750.000**		**159.500.000**		**184.500.000**		**227.000.000**		227.000.000		
		1	03	01	'2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	16 item	16 item	12.000.000	16 item	12.000.000	16 item	12.000.000	16 item	12.000.000	16 item	12.000.000	16 item	12.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 item	25 item	20.000.000	25 item	20.000.000	25 item	20.000.000	25 item	20.000.000	25 item	20.000.000	25 item	20.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Atk yang tersedia	37 item	37 item	37.500.000	37 item	37.500.000	37 item	40.000.000	37 item	50.000.000	37 item	70.000.000	37 item	70.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	'2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak, Dokumentasi, Penggandaan yang ada	18 item	18 item	33.750.000	18 item	33.750.000	18 item	40.000.000	18 item	50.000.000	18 item	60.000.000	18 item	60.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	12 item	12 item	12.500.000	12 item	12.500.000	12 item	12.500.000	12 item	12.500.000	12 item	15.000.000	12 item	15.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	152 item	152 item	28.877.501	152 item	32.000.000	152 item	35.000.000	152 item	40.000.000	152 item	50.000.000	152 item	50.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2,07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**100%**		**50.000.000**		**60.000.000**		**80.000.000**		**90.000.000**		**100.000.000**		100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor / bangunan lainnya yang tersedia	4 unit	5 unit	50.000.000	5 unit	60.000.000	5 unit	80.000.000	5 unit	90.000.000	5 unit	100.000.000	5 unit	100.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2,08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase layanan jasa penunjang yang tersedia dengan baik**	**100%**		**2.828.731.547**		**2.848.500.000**		**2.918.500.000**		**2.965.000.000**		**3.006.000.000**		3.006.000.000		
		1	03	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah terkirimnya surat yang terselesaikan	760 surat	760 surat	4.000.000	760 surat	4.000.000	760 surat	4.000.000	760 surat	5.000.000	760 surat	6.000.000	760 surat	6.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air, Listrik, Telepon, Internet yang terbayar	4 rekening	4 rekening	904.500.000	4 rekening	904.500.000	4 rekening	954.500.000	4 rekening	980.000.000	4 rekening	1.000.000.000	4 rekening	1.000.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit	7 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	7 unit	20.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga Administrasi/teknis kegiatan, jasa pengaman kantor, pengemudi, penjaga Waduk, tenaga kebersihan, operator excavator yang terbayar	74 orang	74 orang	1.900.231.547	74 orang	1.920.000.000	74 orang	1.940.000.000	74 orang	1.960.000.000	74 orang	1.980.000.000	74 orang	1.980.000.000	Sekretariat	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	2,09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**100%**		**179.412.000**		**179.412.000**		**179.412.000**		**250.000.000**		**310.000.000**		310.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	01	'2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau operasional	- 8 unit -10 unit	- 8 unit -10 unit	99.412.000	- 8 unit -10 unit	99.412.000	- 8 unit -10 unit	99.412.000	- 8 unit -10 unit	100.000.000	- 8 unit -10 unit	110.000.000	- 8 unit -10 unit	110.000.000		Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	01	'2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	- 1 unit - 5 unit	- 1 unit - 5 unit	80.000.000	- 1 unit - 5 unit	80.000.000	- 1 unit - 5 unit	80.000.000	- 1 unit - 5 unit	150.000.000	- 1 unit - 5 unit	200.000.000	- 1 unit - 5 unit	200.000.000		Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	1	03	02	2.01		**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**- Persentase ketersediaan air baku - Persentase Luas Area Bebas Genangan banjir Banjir - Persentase Jaringan irigasi berkondisi Baik**	**- 79,17% - 32,11% - 68,05%**		**26.091.003.100**		**32.496.003.100**		**32.983.443.147**		**33.478.194.794**		**34.130.367.716**		34.130.367.716		
		1	03	02	2,01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	- Volume ketersediaan air baku - Luas area bebas genangan banjir	- 92.688.180 m3 - 2440ha		**16.270.500.000**		**20.571.003.100**		**20.958.443.147**		**21.453.194.794**		**21.755.367.716**		21.755.367.716		
		1	03	02	'2,01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	325 m	426 m	2.710.000.000	433 m	3.000.000.000	440 m	3.000.000.000	447 m	3.000.000.000	454 m	3.000.000.000	454 m	3.000.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	02	'2,01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing	12,000 m	500 m	1.565.500.000	508 m	1.750.000.000	516 m	1.750.000.000	524 m	1.750.000.000	532 m	1.800.000.000	532 m	1.800.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah volume pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	100,070 m3	137650 m3	3.770.000.000	139715 m3	5.150.000.000	141780 m3	5.150.000.000	143845 m3	5.350.000.000	145910 m3	5.400.000.000	145910 m3	5.400.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	jumlah unit air baku yang direhabilitasi	-	50000 m3	1.450.000.000	50750 m3	1.500.000.000	51500 m3	1.500.000.000	52250	1.600.000.000	53000 m3	1.650.000.000	53000 m3	1.650.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	jumlah wilayah rehabilitasi rutin bangunan/tempat penampung air lainnya (force Major)	-	-	0	3 wilayah	350.000.000	3 wilayah	350.000.000	3 wilayah	350.000.000	3 wilayah	350.000.000	3 wilayah	350.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	02	'2,01	46	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Jumlah saluran jaringan irigasi sungai yang dinormalisasi	12000 meter	15400 meter	1.800.000.000	15631 meter	3.171.003.100	15862 meter	3.308.443.147	16093 meter	3.503.194.794	16324 meter	3.605.367.716	16555 meter	3.605.367.716	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	53	Operasi dan PemeliharaanTanggul dan Tebing Sungai	Jumlah panjang kali/saluran yang direhabilitasi	15 lokasi	16 lokasi	4.335.000.000	16 lokasi	4.750.000.000	16 lokasi	5.000.000.000	16 lokasi	5.000.000.000	16 lokasi	5.000.000.000	16 lokasi	5.000.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Jumlah sarana penanggulangan banjir yang tersedia	4 upt	4 upt	600.000.000	4 upt	700.000.000	4 upt	700.000.000	4 upt	700.000.000	4 upt	750.000.000	4 upt	750.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah pompa banjir yang	12 pompa	12 pompa	0	12 pompa	150.000.000	12 pompa	150.000.000	12 pompa	150.000.000	12 pompa	150.000.000	12 pompa	150.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,01	61	Pembinaan dan PemberdayaanKelembagaan PengelolaanSDAKewenangan Kabupaten/Kota	berkondisi baik	-	1 kegiatan	20.000.000	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000	2 kegiatan	25.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	02	'2,01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan KapasitasKelembagaan Pengelolaan SDAKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi dan pembinaan peningkatan pemahaman dan kesadaran pengelolaan air irigasi yang dilakukan	-	3 kegiatan	20.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	25.000.000	3 kegiatan	25.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	2,02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primerdan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi kondisi baik	1018,76 km		9.820.503.100		11.925.000.000		12.025.000.000		12.025.000.000		12.375.000.000		12.375.000.000		
		1	03	02	'2,02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang	1183 meter	1500 meter	3.195.000.000	1523 meter	3.500.000.000	1546 meter	3.500.000.000	1569 meter	3.500.000.000	1592 meter	3.600.000.000	1592 meter	3.600.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab.

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								dibangun															Lamongan
		1	03	02	'2,02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	jumlah unit/buah Dam/Pintu Air yang dibangun	4 buah	10 buah	1.450.000.000	11 buah	1.600.000.000	12 buah	1.600.000.000	13 buah	1.600.000.000	14 buah	1.600.000.000	14 buah	1.600.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi desa yang direhabilitasi	3090 meter	3822 meter	2.469.500.000	3880 meter	3.350.000.000	3938 meter	3.350.000.000	3996 meter	3.350.000.000	4054 meter	3.500.000.000	4054 meter	3.500.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Ketersediaan airbaku dan luas area irigasiyang terairi	7 DI	16 DI	1.457.232.100	17 DI	1.650.000.000	18 DI	1.650.000.000	19 DI	1.650.000.000	20 DI	1.650.000.000	20 DI	1.650.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan Irigasi yang di Rehabilitasi	6 Di	1523 meter	1.098.771.000	1546 meter	1.200.000.000	1500 meter	1.300.000.000	1592 meter	1.300.000.000	1615 meter	1.400.000.000	1615 meter	1.400.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Idikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
										Target 2022		Target 2023		Target 2024		Target 2025		Target 2026					
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1	03	02	'2,02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	jumlah unit/buah Dam/Pintu Air yang direhabilitasi	9 Dam / Pintu Air	10 Dam / Pintu Air	50.000.000	11 Dam / Pintu Air	200.000.000	12 Dam / Pintu Air	200.000.000	13 Dam / Pintu Air	200.000.000	14 Dam / Pintu Air	200.000.000	15 Dam / Pintu Air	200.000.000	Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah kegiatan sosialisasi dan partisipasi pengelolaan aset dan perijinan SDA	5 kegiatan	-	0	5 kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	25.000.000	5 kegiatan	25.000.000	Bidang BinaPenatagunaan Sumber Daya Air	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	21	Operasi dan PemeliharaanJaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Unit/Buah Dam/Pintu Air yang Direhabilitasi	4 upt	-	0	4 upt	200.000.000	4 upt	200.000.000	4 upt	200.000.000	4 upt	200.000.000	4 upt	200.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan
		1	03	02	'2,02	27	Operasional unit Pengelola Irigasi	Jumlah peralatan besar berkondisi baik	12 Unit	12 Unit	100.000.000	13 unit	200.000.000	14 unit	200.000.000	15 unit	200.000.000	16 unit	200.000.000	16 unit	200.000.000	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Dinas PU. Sumber Daya Air Kab. Lamongan

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sumber Daya Air berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam Perubahan RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada Tabel 7.1:

TABEL VII.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Peride RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Tujuan:** Indeks Infrastruktur Irigasi	76,43%	75,30%	75,62%	75,86%	76,26%	76,49%	76,49%
2	**Sasaran :** Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	79,63%	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86,00%	86,00%
	Nilai SAKIP Dinas PU. Sumber Daya Air	86,76%	87,01%	87,26%	87,51%	87,76%	88,01%	88,01%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugasdan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan selama periode tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang terukur,berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertaidengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaanperencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air harus tertuang dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sesuai pentahapan nya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.Diharapkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telahditetapkan secara konsisten

PENJABARAN DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RENCANA STRATEGIS DINAS PU. SUMBER DAYA AIR TAHUN 2021-2026

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
Tujuan: Meningkatkan Sumber Air Baku Secara Merata	Indeks Infrastruktur Irigasi	Indikator ini menghitung indikator kinerja organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari indeks jaringan irigasi berkondisi baik dan indeks ketersediaan air baku	(Indeks Jaringan Irigasi + Indeks Air Baku) / Jumlah Indeks X 100 %
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Pertanian	Rasio luasan sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam	Indikator ini menghitung luas baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam di wilayah Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten	Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam / Jumlah Baku Sawah X 100 %
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai Sakip merupakan akumulasi penilaian dari komonen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja. Nilai SAKIP PD dikeluarkan oleh Inspektorat	Penilaian dari Inspektorat
Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Dinas PU. Sumber Daya Air	Hasil Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Dinas PU. Sumber Daya Air	Nilai Interval SKM
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Ketersediaan Air Baku	yang dimaksud dengan air baku pada indikator ketersediaan air baku adalah ketersediaan air baku untuk pertanian, air baku adalah sumber air yang terdapat dipermukaan	Jumlah Air Baku Yang Ada / Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkan X 100 %

Uraian	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi
		tanah seperti sungai, waduk, embung/telaga yang merupakan tampungan air hujan.	
	Prosentase Jaringan Irigasi Kondisi Baik	Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.	$\frac{\text{panjang jaringan irigasi berkondisi baik}}{\text{jumlah panjang jaringan irigasi}} \times 100\ \%$
	Prosentase Luas Area Bebas Genangan Banjir	Indikator ini menghitung luas area bebas genangan banjir pada daerah rawan genangan banjir	$\frac{\text{Luas Bebas Genangan Banjir}}{\text{Luas Area Rawan Genangan Banjir}} \times 100\ \%$